

**PENGARUH PERSEPSI KEKUASAAN  
OTORITAS PAJAK DAN KEPERCAYAAN  
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN P-2  
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di  
Kabupaten Pati)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**ADHI WAHYU SETYO NUGROHO**  
**NIM. 12030112130162**

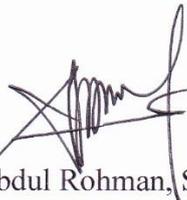
**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Adhi Wahyu Setyo Nugroho  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112130162  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH PERSEPSI KEKUASAAN  
OTORITAS PAJAK DAN KEPERCAYAAN  
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN P-2 (Studi pada Wajib Pajak  
Orang Pribadi di Kabupaten Pati)**  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 18 April 2016

Dosen Pembimbing,



(Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt)

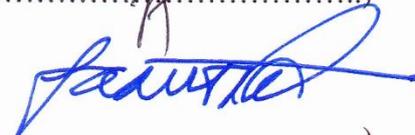
NIP. 19660108 199202 1001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Adhi Wahyu Setyo Nugroho  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112130162  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH PERSEPSI KEKUASAAN  
OTORITAS PAJAK DAN KEPERCAYAAN  
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN P-2 (Studi pada Wajib  
Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 24 Mei 2016.**

### **Tim Penguji:**

1. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt (..........)
2. Dr. Indira Januarti, S.E., M.Si., Akt (..........)
3. Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA., Ph.D., Akt (..........)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Adhi Wahyu Setyo Nugroho menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Pengaruh Persepsi Kekuasaan Otoritas Pajak dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan P-2 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 18 April 2016  
Yang membuat pernyataan,

(Adhi Wahyu Setyo Nugroho)  
NIM. 12030112130162

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*

*(QS Al Insyirah : 6-8)*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:*

- *Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rasmin dan Ibu Sumini*
- *Mas Andi, Mbak Iza, dan Dek Tika*
- *Rizki Amaliah, temanku*
- *Keluarga, saudara, dan kerabat*
- *Seluruh teman-teman yang selalu mendukung*
- *Almamaterku*

## **ABSTRACT**

*This research aimed to investigate the influence of perception of the power of tax authorities on the trust, trust on the tax compliance, and perception of the power of tax authorities on the tax compliance. This research consist of one dependent variable, one independent variable, and one intervening variable. Dependent variable in this research is tax compliance, independent variable is perception of the power of tax authorities, and the intervening variable is trust.*

*This study used a questionnaire in data collection, respondents in this study is the individual tax payer on Land and Building Tax in Pati district. Next step, data collected by incidental sampling. Number of samples in this research is 98 respondents. This study used Structural Equation Modelling with SmartPLS 3.0 software.*

*The results showed that power of tax authorities has positive effect on trust. Furthermore, trust has positive effect on tax compliance. The result of this research also shows that power of tax authorities has positive effect on tax compliance.*

*Keywords: power of tax authorities, trust, tax compliance*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kekuasaan otoritas pajak terhadap kepercayaan, kepercayaan terhadap kepatuhan pajak, dan persepsi kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen, satu variabel independen, dan satu variabel intervening. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak, variabel independen adalah persepsi kekuasaan otoritas pajak, dan variabel intervening adalah kepercayaan.

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pati. Kemudian data dikumpulkan dengan metode sampling insidental. Jumlah sampel yang diolah sebanyak 98 responden. Penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modelling* dengan software SmartPLS 3.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Selanjutnya kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci: kekuasaan otoritas pajak, kepercayaan, kepatuhan pajak

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan tulus penuh kasih memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Kekuasaan Otoritas Pajak dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan P-2 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Fuad, S.E.T, M.Si., Akt., Ph.D. dan Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt., PhD. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah memberikan banyak pelajaran penting bagi penulis.
3. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang selama proses penyusunan skripsi telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu.
4. Prof. Dr. H. Muchammad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku dosen wali yang memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, khususnya Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
6. Seluruh staf administrasi, akademik, dan data SIMAWEB di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan kelancaran proses administrasi selama kuliah dan penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua yang luar biasa dan selalu aku cintai, Bapak Rasmin, S.Pd., MM. dan Ibu Sumini, S.Pd. yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Mas Andi, Mbak Iza, dan dek Tika yang kusayangi, terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat yang diberikan hingga hari ini kepada penulis.
9. Rizki Amaliah, S.Si. terima kasih telah menjadi teman yang sangat baik selama beberapa bulan terakhir ini dan telah memberikan semangat lebih kepada penulis selama proses penyusunan skripsi, semoga Allah SWT memberikan kemudahan jalan bagi kita kedepannya.
10. Muhammad Luthfi, teman sejak kelas 7 SMP yang memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih sudah bersedia ditanya mengenai skripsi maupun hal lain.
11. Sahabat-sahabat di STMJ, terima kasih untuk kebersamaannya dari awal kuliah hingga sekarang. Semoga persahabatan kita tidak akan terputus hanya karena jarak dan waktu yang memisahkan kelak.
12. Teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2012, terima kasih atas cerita indah yang kalian ciptakan selama 4 tahun ini.

13. Teman-teman TIM II KKN UNDIP Tahun 2015 Kabupaten Temanggung, Kecamatan Ngadirejo, khususnya Desa Gondangwinangun, Anton, Anwar, Kiki, Devi, Nisa, Cicik, Riska, dan Dewi, terima kasih atas kebersamaan, kekompakkan, dan kekeluargaan yang terjalin hingga saat ini.
14. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 18 April 2016

Penulis

(Adhi Wahyu Setyo Nugroho)

NIM. 12030112130162

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUHUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu .....	10
2.1.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1.1 Teori Atribusi .....	10
2.1.1.2 Perpajakan .....	12
2.1.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	13
2.1.1.4 Persepsi Kekuasaan Otoritas Pajak .....	14
2.1.1.5 Kepercayaan .....	16
2.1.1.6 Kepatuhan Pajak.....	17
2.1.2 Penelitian Terdahulu .....	19
2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	23
2.3 Hipotesis .....	25
2.3.1 Pengaruh Persepsi Kekuasaan Otoritas Pajak terhadap Kepercayaan .....	25
2.3.2 Pengaruh Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pajak.....	27
2.3.3 Pengaruh Persepsi Kekuasaan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak .....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	29
3.1.1 Variabel Dependen.....	29
3.1.2 Variabel Independen .....	29
3.1.3 Variabel Intervening .....	30
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian .....	31

3.3 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.5 Metode Analisis Data.....	33
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	33
3.5.2 Uji Non-Response Bias .....	33
3.5.3 Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	34
3.5.3.1 Validitas Konvergen ( <i>Convergen Validity</i> ).....	34
3.5.3.2 Validitas Diskriminan ( <i>Discriminant Validity</i> ).....	34
3.5.3.3 Uji Reliabilitas .....	35
3.5.2 Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	35
BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....	36
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	36
4.2 Analisis Data .....	38
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	38
4.2.2 Hasil Uji Non-Response Bias .....	40
4.2.3 Menilai Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	41
4.2.3.1 Validitas Konvergen ( <i>Convergen Validity</i> ) .....	41
4.2.3.2 Validitas Diskriminan ( <i>Discriminant Validity</i> ) .....	43
4.2.3.3 Uji Reliabilitas .....	46
4.2.4 Pengujian Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	46
4.2.5 Pengujian Hipotesis.....	48
4.2.5.1 Pengujian Hipotesis 1 (Persepsi kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepercayaan) .....	49
4.2.5.2 Pengujian Hipotesis 2 (Kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak).....	50
4.2.5.3 Pengujian Hipotesis 3 (Persepsi kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak) ..	50
4.3 Pembahasan .....	51
4.3.1 Hipotesis 1 .....	51
4.3.2 Hipotesis 2 .....	53
4.3.3 Hipotesis 3 .....	55
BAB V PENUTUP .....	58
5.1 Simpulan.....	58
5.2 Keterbatasan .....	59
5.3 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	61

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penerimaan Pajak terhadap APBN .....	2
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner Penelitian .....	36
Tabel 4.2 Profil Responden.....	38
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif .....	39
Tabel 4.4 Uji Non-Response Bias .....	40
Tabel 4.5 <i>Outer Loadings (Measurement Model)</i> .....	41
Tabel 4.6 Nilai <i>Discriminant Validity (Cross Loading)</i> .....	44
Tabel 4.7 AVE dan Akar Kuadrat AVE.....	45
Tabel 4.8 <i>Latent Variable Correlation</i> .....	45
Tabel 4.9 <i>Composite Reliability</i> dan <i>Cronbach's Alpha</i> .....	46
Tabel 4.10 Nilai <i>R Square</i> .....	47
Tabel 4.11 <i>Path Coefficients</i> .....	48
Tabel 4.12 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....	51

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	24
Gambar 4.1 Model Struktural .....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Kuesioner .....	63
Lampiran B Hasil Output Olah Data.....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendapatan negara secara umum dapat diperoleh dari dua sektor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Pajak termasuk sebagai satu dari beberapa pendapatan negara yang diperoleh dari sektor internal, yang mana pajak juga menjadi pendapatan negara paling besar. Sedangkan untuk sumber pendapatan eksternal negara contohnya seperti pinjaman luar negeri. Pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan pendapatan internal dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan sumber pendapatan eksternal. Upaya pemerintah untuk lepas dari ketergantungan luar negeri dan menggunakan kemampuan dalam negeri dapat dicapai dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Pendapatan dari sektor pajak mencakup pajak dalam negeri serta pajak perdagangan internasional dimana sampai sekarang ini menjadi sumber utama pendapatan pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait perpajakan berperan sangat penting dalam pengelolaan ekonomi nasional. Pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pajak akan dikembalikan lagi secara tidak langsung kepada masyarakat demi kemakmuran dan kesejahteraan.

Pajak menjadi hal yang sangat penting pada komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikarenakan jumlahnya selalu mengalami kenaikan tiap tahun dan menjadikannya sebagai pendapatan internal terbesar. Begitu pentingnya fungsi pajak untuk menyelenggarakan pembangunan terlihat

dari jumlah penerimaannya yang tiap tahunnya diatas 70% dari total APBN. Berikut ini adalah persentase pendapatan dari sektor pajak dibandingkan dengan total APBN selama 5 tahun mulai 2010-2014:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak terhadap APBN**  
**(dalam milyar rupiah)**

No.	Tahun Anggaran	Jumlah		Persentase Pajak : APBN
		APBN	Pajak	
1.	2010	992.249	723.307	72,90 %
2.	2011	1.205.346	873.874	72,50 %
3.	2012	1.332.323	980.518	73,59 %
4.	2013	1.497.521	1.148.365	76,68 %
5.	2014	1.661.148	1.310.219	78,87 %

Sumber : Kementerian Keuangan, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (2014)

Peningkatan pendapatan dari sektor pajak terus diupayakan oleh pemerintah dengan berbagai macam cara. Amandemen dilaksanakan pada peraturan di sektor pajak dan retribusi daerah dengan harapan penerimaan daerah dari sektor perpajakan dapat ditingkatkan. Tindakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mendukung otonomi daerah. Dijalankannya otonomi daerah dengan baik diharapkan mampu membuat tiap daerah menjadi mandiri dan mampu mengelola sumber pendapatannya secara baik. Salah satu amandemen undang-undang yang telah dihasilkan oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) UU No.28 Tahun 2009.

Otonomi daerah memberikan kebebasan bagi masing-masing daerah untuk mengelola pajaknya sendiri. Hal yang paling fundamental dalam UU 28/2009 adalah dialihkannya BPHTB serta PBB P2 menjadi pajak daerah. Pemerintah pusat

awalnya yang melakukan pengelolaan dan pemungutan PBB P2 sebelum adanya amandemen dan hasilnya dibagikan ke tiap daerah secara proporsional. Demi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka selambat-lambatnya pada 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB P2 menjadi hak pemerintah daerah (Pedoman Umum Pengelolaan PBB P2, 2014).

Berdasarkan Pasal 180 angka 5 UU 28/2009, masa transisi pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah dimulai pada 1 Januari 2010 hingga 31 Desember 2013. Daerah yang telah siap dapat langsung melakukan pemungutan PBB P2 namun terlebih dahulu harus membuat peraturan daerah (perda) tentang PBB P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Sebaliknya, apabila hingga 31 Desember 2013 daerah masih tidak menetapkan perda mengenai PBB P2, maka daerah tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan pemungutan PBB P2, dan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk membayar PBB P2 (Pedoman Umum Pengelolaan PBB P2, 2014).

Beragam cara dilakukan pemerintah demi meningkatkan pendapatan dari sektor pajak seperti pada pajak bumi dan bangunan dengan cara menumbuhkan persepsi kekuasaan otoritas pajak (*perception of the power of tax authorities*) yang baik dimata wajib pajak. Ratmono dan Faisal (2014) menyatakan kebijakan seperti pemeriksaan dan denda pajak dianggap efektif dan sanggup untuk meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap kekuasaan otoritas. Persepsi kekuasaan otoritas pajak yang baik diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat

terhadap pemerintah, sehingga dengan sendirinya masyarakat akan menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Basri (2013) menjelaskan jika kepercayaan dan kekuasaan berada di tingkat paling rendah maka pembayaran pajak diasumsikan rendah, tindakan egois akan dilakukan oleh wajib pajak dengan menghindari pajak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jika kepercayaan wajib pajak meningkat maka kepatuhan pajak diperkirakan meningkat. Selain itu, jika kekuasaan otoritas pajak meningkat, kepatuhan pajak juga diperkirakan akan meningkat.

Kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak memiliki peran penting terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak dalam memebuhi kewajibannya. Argumen tersebut berdasar pada konsep dilema sosial fundamental yaitu anggota masyarakat dihadapkan pada sebuah dilema ketika akan memutuskan keikutsertaan mereka dalam keanggotaan sosial. Hal ini dikarenakan dalam keanggotaan tersebut mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan perasaan memiliki (*sense of belongingness*) terhadap negara. Pada saat yang sama, dimungkinkan terjadi eksploitasi dari otoritas yang menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya dalam keanggotaan tersebut (Ratmono dan Faisal, 2014).

Kirchler (2008) mengusulkan sebuah konsep teoritis sebagai penentu kepatuhan pajak yang disebut dengan *slippery slope framework* yang mengintegrasikan faktor ekonomis dan psikologis. Kepatuhan pajak tergantung pada faktor ekonomis dan psikologis antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat perlu penegakan hukum supaya mereka mematuhi perpajakan atau mereka dapat bekerja sama secara sukarela. Kepatuhan pajak diasumsikan

tergantung pada kekuasaan otoritas pajak dan kepercayaan masyarakat dalam wewenang pemerintah.

Kogler (2013) mengajukan dua dimensi dari *slippery slope framework* dalam penentu kepatuhan pajak yaitu kepercayaan terhadap otoritas pemerintah dan kekuasaan dalam otoritas. Menurut kerangka tersebut, kepatuhan pajak dapat diciptakan baik dengan meningkatkan kepercayaan dalam otoritas atau dengan meningkatkan persepsi kekuasaan otoritas. Namun, kualitas kepatuhan yang dihasilkan berbeda, tergantung pada pembayar pajak yang jujur. Hasil penelitian mendukung asumsi *slippery slope framework* sekaligus mengkonfirmasi peran kepercayaan dan kekuasaan sebagai penentu kepatuhan pajak.

Kastlunger (2013) melakukan penelitian tentang *slippery slope* di Italia dan menemukan bukti bahwa kepercayaan berhubungan dengan kepatuhan pajak sukarela. Hasil dari penelitian tersebut adalah kepercayaan berhubungan negatif dengan kekuasaan koersif. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Basri (2013) yang dapat menunjukkan bahwa kekuasaan dalam otoritas berhubungan positif dengan kepercayaan.

Basri (2013) melakukan penelitian di Riau untuk menguji asumsi kerangka *slippery slope*. Hasil pengujian menunjukkan hasil bahwa kepercayaan pada otoritas pemerintah berhubungan positif dengan kepatuhan sukarela. Hasil yang diperoleh tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilaksanakan Kastlunger (2013) dan Kogler (2013) dimana mereka juga menyatakan bahwa kepercayaan mempengaruhi kepatuhan sukarela secara positif.

Penelitian yang dilaksanakan Basri (2013) juga menyatakan bahwa kekuasaan dalam otoritas berhubungan positif dengan kepatuhan ditegakkan. Hasil yang diperoleh tersebut juga sama dengan hasil penelitian yang dilaksanakan Kastlunger (2013) dan Kogler (2013) dimana mereka mengungkapkan bahwa kekuasaan dalam otoritas mempengaruhi kepatuhan ditegakkan secara positif.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Kastlunger dan Basri dengan menghilangkan variabel *tax evasion*. Penghilangan variabel *tax evasion* dikarenakan dalam PBB P2 sangat kecil peluang untuk dilakukannya *tax evasion* serta peneliti hanya ingin berfokus untuk meneliti pengaruh kekuasaan dan kepercayaan terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan lain yaitu pada penelitian ini berfokus pada kepatuhan pajak, tanpa membedakan antara kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak ditegakkan. Berdasarkan kondisi tersebut, timbul motivasi untuk dilakukannya penelitian dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI KEKUASAAN OTORITAS PAJAK DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P-2 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan pernyataan mengenai keadaan, fenomena, maupun konsep yang memerlukan pemecahan atau solusi melalui suatu penelitian. Pajak Bumi dan Bangunan P-2 merupakan salah satu pajak yang menerapkan *official assessment system*. Besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ditentukan oleh otoritas pajak atau fiskus. Pada PBB P2 wajib pajak tidak bisa menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan, oleh karena itu harus ada

kepercayaan yang lebih dari wajib pajak terhadap otoritas pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain harus ada kepercayaan dari wajib pajak, otoritas pajak juga harus memiliki kekuasaan yang cukup agar dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini yang mendorong dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan P-2.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah persepsi kekuasaan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepercayaan pada otoritas pajak?
2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan P-2 pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati?
3. Apakah persepsi kekuasaan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan P-2 pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kekuasaan otoritas pajak terhadap kepercayaan pada otoritas pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan P-2 pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati.

3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan P-2 pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak akademisi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur dan bukti penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pati, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan mengenai perpajakan sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah penjelasan dan pembahasan dalam penulisan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

## **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini membahas deskripsi objek penelitian, analisis data, dan hasil pengujian statistik.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini membahas kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk perbaikan di masa mendatang.